



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jl. Jendral Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6 Pangkalan Masyhur, Medan

KATA PENGANTAR

Anggaran yang ditetapkan saat ini disebut dengan anggaran kinerja karena penyusunan dan pelaksanaannya memenuhi prinsip prinsip prestasi kerja yang dicapai tahun sebelumnya dan rencana masukan, keluaran, hasil, keuntungan dan dampak yang sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien. Setiap organisasi pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dengan penerapan anggaran kinerja, seluruh pelaksana pembangunan dapat dimotivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

Prinsip dasar anggaran kinerja adalah partisipatif, responsive, kesetaraan, visi yang strategis, efektif dan efisien, profesionalisme, akuntabilitas dan pengawasan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan anggaran kinerja sangat tergantung pada itikad baik aparatur Negara, kepercayaan masyarakat serta motivasi peningkatan kualitas kinerja pemerintah.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kegiatan / Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara TA. 2024 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan seperlunya.

Medan, Juli 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA UTARA



RAJALI, S.Sos, M.SP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19670208.198611.1.001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB-I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-6
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB-II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	II-17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	II-21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumater Utara.....	II-22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-45
BAB-III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	III-5
BAB-IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	IV-1
4.1. Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.....	IV-1
BAB-V PENUTUP	V-1

BAB - I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas : perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun berkenaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Penyusunan Renja dilakukan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penyusunan Renja dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 20 tahun, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijabarkan berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD.

Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena merupakan bagian dari RKPD tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara 2024-2026. Dokumen ini memuat tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang merupakan bagian dari rangkaian penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

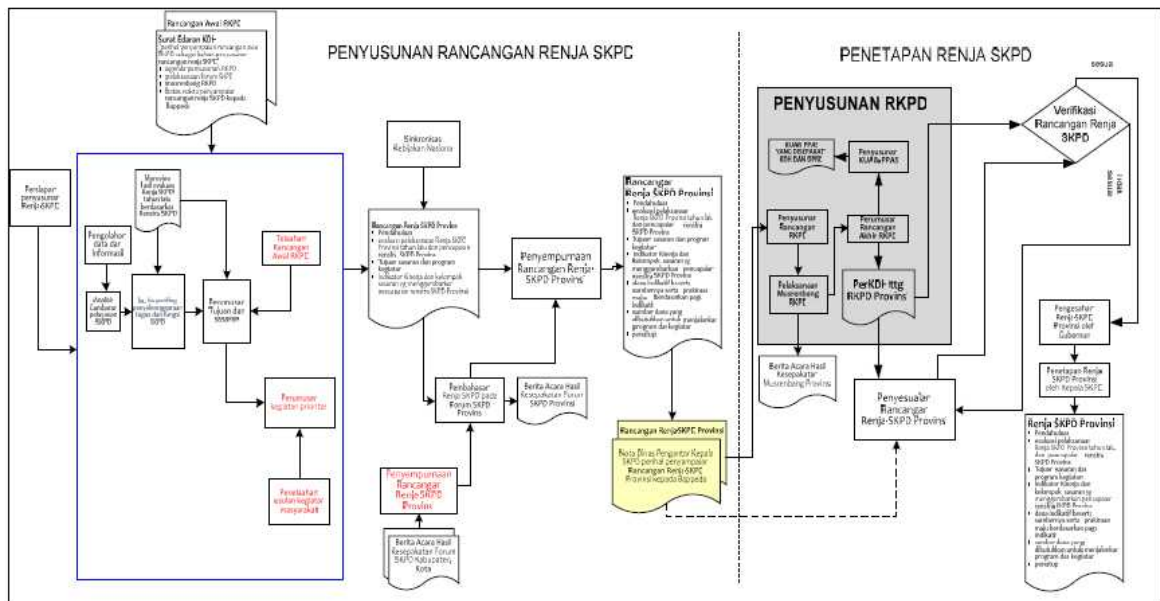
1. Persiapan penyusunan, yang dilaksanakan pada bulan Februari 2023
2. Penyusunan rancangan awal, yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023
3. Penyusunan rancangan, yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023
5. Perumusan rancangan akhir, yang dilaksanakan pada bulan April-Juni 2023
6. Penetapan, yang ditetapkan pada bulan Juli 2023

Tahapan persiapan penyusunan RENJA Perangkat Daerah meliputi pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Penyusunan dan Perumusan rancangan RENJA Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut :

- 1) Pengolahan data dan informasi;
- 2) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- 3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
- 4) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 5) Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- 6) Perumusan tujuan dan sasaran;
- 7) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- 8) Perumusan kegiatan prioritas;
- 9) Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;
- 10) Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- 11) Pembahasan Forum Perangkat Daerah;
- 12) Penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan

prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan kementerian terkait Bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah Provinsi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1. Bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah Provinsi

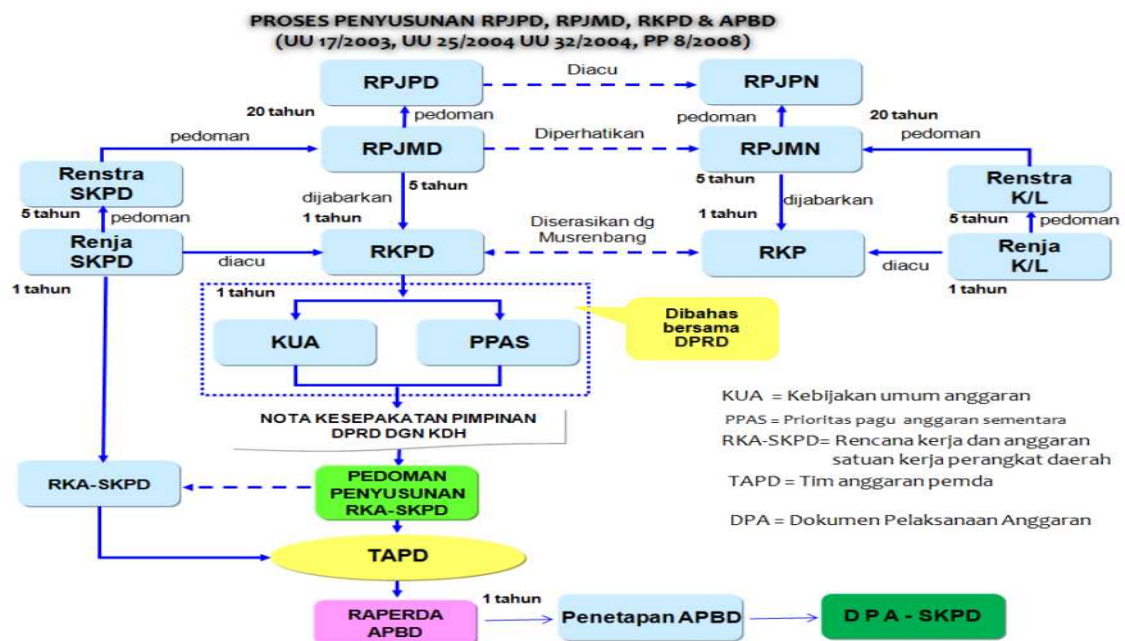
Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2019-2024, RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 dan RPD Provinsi Sumatera Utara 2024-2026.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi

(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah), (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2. Proses Penyusunan dan Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya

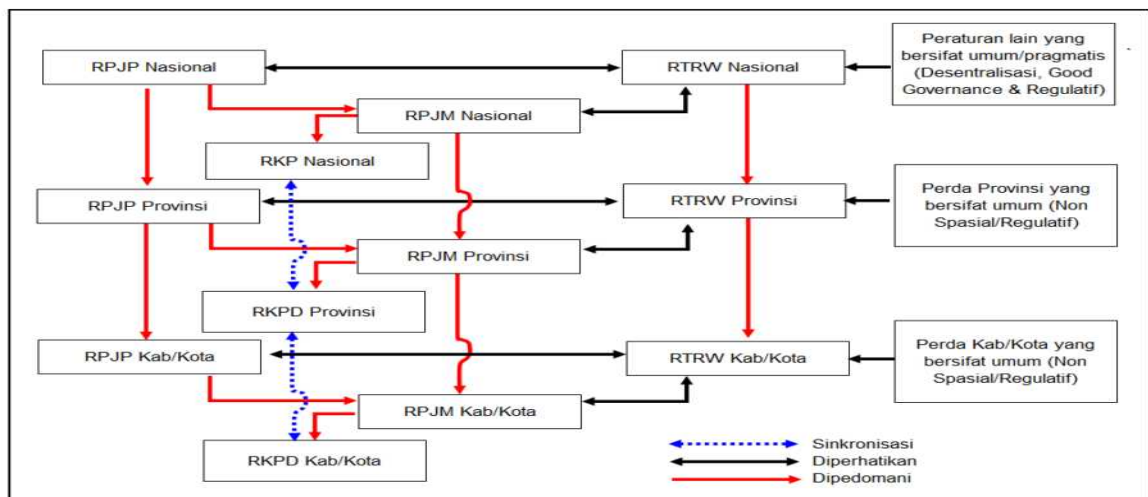
Mengacu pada Gambar. 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut : Renja Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. Selanjutnya RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan R.APBD.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan

penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun R.APBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
2. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
3. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah.
4. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RKDP.

Kemudian selanjutnya dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini juga harus diselaraskan dengan dokumen RKP Nasional dan Renja K/L. Selain itu juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar. 1.3.



Gambar 1.3. Bagan keterkaitan RKPD Provinsi dengan dokumen perencanaan tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

- 1.** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);
- 2.** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478)
- 3.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4.** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5.** Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6.** Undang Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170)
- 7.** Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 8.** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 9.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
- 10.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
15. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tanggal 05 Desember 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan daerah serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran prioritas Pembangunan Daerah tahun 2020 – 2024.
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan

antarsektor, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.

3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Susunan Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang;** Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum;** Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan;** Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan;** Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;** Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah; Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD; Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat; Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-

asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah; Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah; Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program Dan Kegiatan; Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB - II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Kajian atau review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun Lalu (Tahun n-2) dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (Tahun n-1), Mengacu Pada APBD tahun berjalan serta dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara tahun-tahun sebelumnya.

Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2023 TW I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		
		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.
(3)	(4)	(5)			(6)			(9)			(10)		
Urusan Wajib													
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				-			1.400.911.945						
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi				93	poin	1.048.989.150			-			
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan DaerahProvinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							299.992.450			-			
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1	laporan	299.992.450			-			
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan DaerahProvinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							148.920.000			-			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok danPangan Lainnya				1	laporan	148.920.000			-			

Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi							350.060.000			-			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1	laporan	350.060.000			-			
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi							250.016.700			-			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1	laporan	250.016.700			-			
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan dan Gizi				2	%	201.953.200			-			
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi						201.953.200			-			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah daerah rawan pangan dan gizi yang diintervensi				11	kec	201.953.200			-			
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Kenaikan Unit Usaha yang Memiliki Sertifikasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan				10	%	149.969.595			-			
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota							149.969.595			-			
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi (UPTD Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan)	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina				176	layanan	149.969.595			-			

Urusan Pilihan													
Pertanian				104.134.239.605			105.885.004.854			8.196.886.808			8.196.886.808
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	12	bulan	24.895.006.025	12	bulan	25.405.372.308	3	bln	2.375.730.339	3	bln	2.375.730.339
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas di Provinsi Sumatera Utara	64		3.374.561.505	39	laporan	3.459.086.530	5	laporan	246.689.072	5	laporan	246.689.072
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	kali	679.241.096	7	laporan	814.089.060	2	laporan	162.722.368	2	laporan	162.722.368
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50	org/bln	1.740.440.166	7	laporan	1.808.457.780	2	laporan	51.822.000	2	laporan	51.822.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	kali	954.880.243	25	laporan	836.539.690	1	laporan	32.144.704	1	laporan	32.144.704
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	12	bulan	19.803.000	12	bulan	19.999.700			-	-	bulan	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	77.276.962.880	12	bulan	86.156.568.300	3	bulan	9.776.066.714	3	bulan	9.776.066.714
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	bulan	19.803.000	12	bulan	19.999.700	-	bulan	-	-	bulan	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	12	bulan	473.963.212	12	bulan	250.000.000	3	bulan	15.480.000	3	bulan	15.480.000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	bulan	473.963.212	12	bulan	250.000.000	3	bulan	15.480.000	3	bulan	15.480.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	15	org	215.117.350	15	org	200.000.000	4	org	13.636.000	4	org	13.636.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15	org	215.117.350	15	org	200.000.000	4	Org	13.636.000	4	org	13.636.000
Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan	12	bulan	1.277.924.7	12	bulan	1.031.741.271	3	bln	26.799.000	3	bln	26.799.000

Perangkat Daerah	Layanan Administrasi			22									00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	tahun	66.158.500	1	tahun	50.000.000	-		-	-	tahun	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	tahun	101.690.000	1	tahun	80.000.000	-		-	-	unit	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	tahun	30.500.000	1	tahun	29.909.271	-		-	-	tahun	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	tahun	27.977.800	1	tahun	40.000.000	-		-	-	tahun	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	tahun	534.166.000	1	tahun	450.000.000	-		-	-	tahun	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	tahun	517.432.422	1	tahun	381.832.000	-		26.799.000	-	tahun	26.799.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	1	tahun	17.293.490.596	12	laporan	19.013.544.807	-	laporan	2.073.126.267	-	laporan	2.073.126.267
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	tahun	8.799.350	1	laporan	10.000.000	-	laporan	-	-	laporan	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	tahun	530.566.426	1	laporan	800.000.000	-	laporan	93.609.861	-	laporan	93.609.861
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	tahun	10.643.928.417	1	laporan	12.116.999.873	-	laporan	1.676.167.528	-	laporan	1.676.167.528
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Arse Sipiok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	tahun	508.204.151	1	laporan	411.999.573	-	laporan	13.425.796	-	laporan	13.425.796
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Benih Induk Hortikultura Kutagadung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	tahun	376.309.322	1	laporan	299.968.886	-	laporan	19.128.503	-	laporan	19.128.503
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Benih Induk Hortikultura Gedung Johor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	tahun	758.144.420	1	laporan	799.989.647	-	laporan	52.664.688	-	laporan	52.664.688
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Sertifikasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	tahun	562.413.672	1	laporan	589.999.655	-	laporan	28.934.465	-	laporan	28.934.465

Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	yang Disediakan												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	tahun	232.122.398	1	laporan	340.961.196	-	laporan	22.774.540	-	laporan	22.774.540
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Benih Induk Padi Tanjung Morawa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	tahun	385.785.310	1	laporan	412.194.542	-	laporan	7.890.390	-	laporan	7.890.390
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Benih Induk Palawija Tanjung Selamat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	tahun	346.757.790	1	laporan	529.730.102	-	laporan	41.714.106	-	laporan	41.714.106
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	tahun	1.812.535.087	1	laporan	1.703.701.143	-	laporan	36.171.835	-	laporan	36.171.835
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Pelatihan dan Mekanisasi Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	tahun	1.127.924.253	1	laporan	998.000.190	-	laporan	80.644.555	-	laporan	80.644.555
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	tahun	2.240.145.640	128	unit	1.431.000.000	-	unit	-	-	unit	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	tahun	948.506.462	75	unit	632.000.000	-	unit	-	-	unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	tahun	1.093.266.754	3	unit	599.000.000	-	unit	-	-	unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	tahun	198.372.424	50	unit	200.000.000	-	unit	-	-	unit	-
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	a. Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan												
	1. Padi	15,39	%		17	%		-	%				

	2. Jagung	16,46	%		19	%		-	%				
	3. Kedelai	26,62	%		30,96	%		-	%				
	4. Akabi	9,01	%		11,59	%		-	%				
	b. Persentase penyediaan benih hortikultura												
	1. Bawang Merah	9,22	%		10,08	%		-	%				
	2. Cabai	2,39	%		2,41	%		-	%				
	3. Sayur-sayuran	0,46	%		0,47	%		-	%				
	4. Buah buahan	1,19	%		1,21	%		-	%				
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		43.777	ha, unit, paket	37.817.463.179	12.421	ha, unit, paket	29.824.070.054	1.507	ha, unit, paket	5.003.134.870	1.507	ha, unit, paket	5.003.134.870
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (2 paket) Uji Analisa Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	paket	533.247.213	4	paket	539.997.678	-	paket	-	-	paket	-
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Bantuan Saprodi Budidaya Bawang Merah Bantuan Saprodi Budidaya Cabai Bantuan Saprodi Budidaya Kentang Pengembangan Aneka Buah (Pisang, Jeruk, durian, alpukat) dan Tanaman Hias, Pengembangan Penangkar Benih Bawang Merah dan Kentang	27.710	ha, unit	19.442.914.361	5.752	ha, unit	17.171.420.483	107	ha, unit	4.554.535.546	107	ha, unit	4.554.535.546
	Bantuan saprodi bawang merah	89	ha		96	ha		43	ha				
	Bantuan saprodi cabai merah	85	ha		96	ha		38	ha				
	Bantuan saprodi budidaya jahe	10	ha		20	ha		10	ha				
	Bantuan saprodi budidaya kentang	15	ha		32	ha		16	ha				
	Pengembangan aneka buah (durian, jeruk, pisang)	27500	btg		5.500	btg		-	btg				
	Penangkar benih bawang dan kentang	11	ha		8	ha		-	ha				
	Kawasan budidaya bawang	26	ha										

	merah (P APBD)												
	Kawasan Cabai Merah (P APDB)	56	ha										
	Kawasan Budidaya Kentang (P APBD)	37	ha										
	Kawasan budidaya jahe (P APBD)	31	ha										
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Arse Sipirok	Perbanyak Benih Batang Bawah Jeruk JC Perbanyak Benih Bawang Merah Perbanyak Benih cabai	1	paket	899.866.080	1	paket	349.964.525	-	paket	-	-	paket	-
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura UPTD Benih Induk Hortikultura Kutagadung	Pemeliharaan BPMT Jeruk Pemeliharaan Pohon Induk Aneka Buah Pemurnian Varietas Benih Ercis Perbanyak Benih Bawang Merah Perbanyak Benih Ercis Perbanyak Benih Jeruk JC Perbanyak Benih Jeruk Lanjutan Perbanyak Benih Kentang G0 - G1 Perbanyak Benih Kentang G0 Sistem Areoponik Perbanyak benih Kentang G1 - G2 1 Ha Perbanyak Benih Kentang Planlet G0 Perbanyak Benih Wortel 1 Ha Perbanyak Kentang Sistem Kultur Jaringan Permurnian Varietas Benih Wortel	1	paket	1.286.401.985	1	paket	999.997.819	-	paket	18.510.000	-	paket	18.510.000
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura UPTD Benih Induk Hortikultura Gedung Johor	Perbanyak Bibit Tanaman aneka Buah, pengembangan Bibit pisang	1	paket	1.319.155.992	1	paket	1.945.694.903	-	paket	120.050.000	-	paket	120.050.000
Pengawasan Mutu,	Perbanyak Benih Bawang	1	paket	394.365.090	1	paket	349.992.000	-	paket	3.000.000	-	paket	3.000.00

Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	Merah dan kentang												0
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Bantuan Benih Jagung Bantuan Benih padi Pengembangan Budidaya Kacang Tanah dan Kacang Hijau Pengembangan Penangkaran Benih Padi	16.055	ha, unit	12.175.665.909	6.657	ha, unit	6.597.510.915	1.400	ha, unit	212.239.324	1.400,00	ha, unit	212.239.324
	Bantuan benih jagung	2.500	ha		398	ha		-	ha				
	Bantuan benih padi	12.250	ha		3.476	ha		-	ha				
	Bantuan benih kedelai	300	ha		100	ha		-	ha				
	Bantuan benih kacang hijau	50	ha		-	ha		-	ha				
	Bantuan benih kacang tanah	75	ha		27	ha		-	ha				
	Bantuan benih ubi jalar	50	ha		50	ha		50	ha				
	Bantuan benih ubi kayu	130	ha		50	ha		50	ha				
	Integrateg Farming	350	Ha		-	Ha		-	Ha				
	Bantuan benih bagi penangkar	350	Ha		140	Ha		-	Ha				
	Cadangan benih daerah				500	Ha		-	Ha				
	Pengembangan kawasan padi				1.500	ha		900	ha				
	Pengembangan kawasan jagung				400	ha		400	ha				
	Alsintan (Appo, Roda 3, Rumah Kompos)				16	unit		-	unit				
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Arse Sipirok	Perbanyak Benih Porang, Ubi Kayu, Ubi Jalar	1	paket	199.999.858	1	paket	224.997.100	-	paket	-	-	paket	-
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	Perbanayakan Benih Kacang Tanah dan Padi Sawah	1	paket	338.920.142	1	paket	269.979.000	-	paket	24.500.000	-	paket	24.500.000
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan UPTD Benih Induk Padi Tanjung Morawa	Perbanyak Benih Padi Sawah	1	paket	826.926.899	1	paket	949.989.800	-	paket	33.900.000	-	paket	33.900.000
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Perbanayakan benih Kacang Hijau	1	paket	399.999.650	1	paket	424.525.831	-	paket	36.400.000	-	paket	36.400.000

Benih/Bibit Tanaman Pangan UPTD Benih Induk Palawija Tanjung Selamat	Perbanyak Benih Kacang Tanah Perbanyak Benih Kedelai												
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	a. Persentase lahan sawah yang diairi jaringan irigasi	0,92	%		0,92	%		-	%			%	
	b. Persentase jalan pertanian yang dapat dilalui	3,60	%		3,60	%		-	%			%	
	c. Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian	1,18	%		1,18	%		-	%			%	
Penataan Prasarana Pertanian	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian	271	ton, m2, paket	30.739.369. 773	3.847	ton, m2, paket	37.959.678.691	-	ton, m2, paket	269.888.740	-	ton, m2, paket	269.888. 740
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Pengadaan pupuk anorganik	126,7	ton	253.718.562	71,4	ton	626.969.650	-	ton	70.084.780	-	ton	70.084.7 80
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan, Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	3	unit	1.562.613.0 95	2.794,4	m2	3.916.435.710	-	m2	64.778.000	-	m2	64.778.0 00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Pembangunan jaringan irigasi sumur air dalam, pembangunan/pengembangan jaringan irigasi tersier (irigasi desa)	3	unit	12.090.077. 055	317,5	m2	1.627.999.610	-	m2	92.306.000	-	m2	92.306.0 00
Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian UPTD Benih Induk Hortikultura Gedung Johor	Belanja Genset, Sumur Pemboran, Bangunan Gedung, Instalasi Air Kotor dan pemeliharaan gedung dan bangunan	1	paket	11.496.770. 735	1	paket	2.080.324.275	-	paket	-	-	paket	-
Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian UPTD Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pemeliharaan laboratorium pertanian			-	1	paket	319.797.000	-	paket	-	-	paket	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pengadaan alat mesin pertanian	134	unit	4.508.430.6 61	654	unit	4.451.879.772	-	paket	31.115.960	-	paket	31.115.9 60
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya UPTD Pelatihan dan	Pengujian Mutu dan Modifikasi Alat mesin Pertanian	1	paket	237.574.425	1	paket	249.999.754	-	paket	11.604.000	-	paket	11.604.0 00

Mekanisasi Pertanian													
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Arse Sipirok	Pemeliharaan gedung UPTD serta sarana pendukungnya			-	1	paket	3.513.000.000	-	paket	-	-	paket	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya UPTD Benih Induk Hortikultura Kutagadung	Pemeliharaan gedung UPTD serta sarana pendukungnya	1	paket	199.542.589	1	paket	3.723.790.000	-	paket	-	-	paket	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya UPTD Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pemeliharaan gedung UPTD serta sarana pendukungnya				1	paket	2.094.000.000	-	paket	-	-	paket	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Gabe Hutaraja	Pemeliharaan gedung UPTD serta sarana pendukungnya			390.642.651	1	paket	2.730.000.000	-	paket	-	-	paket	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya UPTD Benih Induk Padi Tanjung Morawa	Pemeliharaan gedung UPTD serta sarana pendukungnya				1	paket	223.999.920	-	paket	-	-	paket	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya UPTD Benih Induk Palawija Tanjung Selamat	Pemeliharaan gedung UPTD serta sarana pendukungnya				1	paket	1.950.243.000	-	paket	-	-	paket	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya UPTD Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan	Pemeliharaan gedung UPTD serta sarana pendukungnya	1	paket		1	paket	10.451.240.000	-	paket	-	-	paket	-
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan OPT/DPI yang dikendalikan	22.606	ha		22.606	ha	1.005.353.234	-	ha	-	-	ha	-

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi				1.327.579.026	1.050	kali, tahun, liter, ha	1.005.353.234	-	kali, tahun, liter, ha	-	-	kali, tahun, liter, ha	-
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	27	kali	593.600.700	29	kali	504.078.216	-	kali	-	-	kali	-
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gerakan penanganan Dampak Perubahan Iklim	1	tahun	207.706.000	1	tahun	123.044.018	-	tahun	-	-	tahun	-
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengadaan Pestisida	950	liter	199.540.576	520	liter	140.500.000	-	liter	-	-	liter	-
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pengadaan Benih Padi dan Jagung sebagai Cadangan Benih Daerah	1.000	ha	326.731.750	500	ha	237.731.000	-	ha	-	-	ha	-
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	a. persentase penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani	77	%	10.682.400.628	77	%	11.690.530.567	-	%	548.132.859	-	%	548.132.859
	b. Persentase kelompok tani dengan peningkatan kelasnya	0,65	%		0,65	%		-	%				
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		300	org	705.757.259	90	org	799.999.909	-	org	2.584.000	-	org	2.584.000
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Peningkatan SDM petugas Pertanian (Penyuluh)	90	org	220.369.195	60	orang	499.999.935	-	org	-	-	org	-
Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Penyediaan Tenaga Penyuluh THL-TBPP dan Peningkatan SDM Petani	210	org	485.388.064	30	orang	299.999.974	-	org	2.584.000	-	org	2.584.000
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		492	org	7.544.472.874	492	org	8.588.161.876	35	org	483.651.809	35	org	483.651.809
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Honorarium Petugas Data Harga Kabupaten/Kota Penyusunan Majalah Lensa Tani Dinas TPH Pertemuan Program Penyuluhan	34	org	479.643.455	34	org	1.245.629.404	-	org	19.628.000	-	org	19.628.000
Pelaksanaan Penyuluhan dan	Peningkatan Kompetensi	458	org	7.064.829.4	458	orang	7.342.532.472	35	org	464.023.809	35	org	464.023.

Pemberdayaan Petani	Petugas IPDMIP, Pemilihan Penyuluh, BPK, Petani Berprestasi			19								809	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		85	kali / unit	2.432.170.495	85	kali / unit	2.302.368.782	1	kali / unit	61.897.050	1	kali / unit	61.897.050
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Bimbingan Teknis Petugas dan petani di BPP	7	kali	136.699.700	7	kali	909.524.186	-	kali	6.304.050	-	kali	6.304.050
Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Fasilitasi Pertemuan Petani dan eksportir dan pendampingan manajemen kelembagaan petani	1	tahun	350.316.100	1	tahun	475.612.846	-	tahun	37.948.000	-	tahun	37.948.000
Penilaiin Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Fasilitasi KTNA, Perhiptani, Mimbar saresehan, Rembug Madya,	5	kali	461.807.163	5	kali	199.999.730	1	kali	17.645.000	1	kali	17.645.000
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Demplot bawang merah, cabe merah, bawang putih, kedelai	72	unit	1.483.347.532	72	unit	717.232.020	-	kali	-	-	kali	-
TOTAL BELANJA LANGSUNG							107.285.916.799						8.196.886.808
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG							86.156.568.300						9.776.066.714
JUMLAH KESELURUHAN BL +BTL							193.442.485.099						17.972.953.522

Berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut.

1. Realisasi Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Kegiatan	Anggaran 2022			% Realisasi Kinerja Hasil
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.426.311.186	3.374.561.505	98,49%	100,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.803.000	19.803.000	100,00%	100,00%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	496.025.000	473.963.212	95,55%	100,00%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	254.576.350	215.117.350	84,50%	100,00%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.323.390.200	1.277.924.722	96,56%	100,00%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.701.505.472	17.336.413.046	92,70%	100,00%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.459.483.256	2.240.145.640	91,08%	100,00%
8	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	39.503.086.212	37.817.463.179	95,73%	100,00%
9	Penataan Prasarana Pertanian	31.452.631.035	30.739.369.773	97,73%	100,00%
10	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.363.819.600	1.327.579.026	97,34%	100,00%
11	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Provinsi	748.399.319	705.757.259	94,30%	100,00%
12	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	7.925.303.800	7.544.472.874	95,19%	100,00%
13	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	2.463.696.318	2.432.170.495	98,72%	100,00%

2. Realisasi program yang tidak memenuhi dan yang memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat capaian program prioritas yang melebihi target kinerja yaitu :

No	Indikator Program	Capaian Kinerja (%)
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
1	Terpenuhinya kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura	
	Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan	
-	Padi	102,24
-	Jagung	112,46
-	Kedelai	553,53
-	Aneka Kacang dan Umbi	22,09
	Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura	
-	Bawang Merah	109,17
-	Cabe Merah	100,95
-	Sayur-sayuran	154,41
-	Buah-buahan	708,38
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana Pertanian	
-	Persentase Lahan Sawah yang diairi jaringan Irigasi	83,92
-	Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui	83,33
-	Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian	172,66
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
	Terkendalinya luas serangan OPT/DPI tanaman pangan dan hortikultura	
-	Luas Pengendalian Serangan OPT/DPI	2.775,08
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian	
-	Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani	129,87
-	Persentase Kelompok tani dengan peningkatan kelasnya	1.129,92

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi atau target kinerja program/kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun 2022, pada umumnya faktor-faktor yang menjadi penghambat tercapainya realisasi capaian kinerja pada program/kegiatan adalah :

- a. Secara umum serapan anggaran pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara tidak mengalami masalah yang signifikan namun pada proses kelengkapan administrasi SP2D mengalami keterlambatan.
- b. Aplikasi saat ini terus mengalami penyesuaian sehingga berpengaruh terhadap capaian serapan anggaran.

Sedangkan faktor-faktor terpenuhi capaian program/kegiatan adalah sebagai berikut.

- a. Kegiatan yang berada pada program pendukung memiliki capaian kinerja sesuai dengan target disebabkan karena merupakan kegiatan operasional dari perangkat daerah
- b. Adanya percepatan kegiatan yang bersifat bantuan langsung kepada petani

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
Adanya program/kegiatan yang tidak memenuhi, memenuhi atau melebihi target program/kegiatan terhadap capaian program renstra menyebabkan ada beberapa target program yang tidak terpenuhi dan melebihi target.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor diatas adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan koordinasi secara maksimal dengan petugas pembendaharaan untuk melakukan percepatan penyiapan dokumen SP2D
- b. Melakukan koordinasi dengan pemegang aplikasi keuangan sehingga mempercepat proses peinputan SP2D

Terkait dengan capaian target kinerja dari program prioritas pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan hasil evaluasi, terdapat peningkatan dan penurunan produksi pada beberapa komoditas tanaman pangan dan hortikultura strategis dibandingkan dengan tahun lalu dan target kinerja sesuai dengan rencana strategis yang diakibatkan oleh :

1. Kenaikan

Terjadinya kenaikan produksi disebabkan oleh bantuan benih dan bibit dari pemerintah kepada petani mengalami kenaikan, sehingga meningkatkan luas tanam terhadap komoditas tersebut. Disamping itu, pendampingan, pembinaan dan pengawalan kepada petani oleh penyuluh lapang, memberikan dampak

terhadap kapasitas petani dalam budidaya di lapang, sehingga transfer pengetahuan dan inovasi teknologi kepada petani dapat berjalan dengan baik.

Pada beberapa komoditas hortikultura terjadinya kenaikan produksi, selain adanya bantuan benih/bibit, juga disebabkan oleh faktor harga jual yang tinggi sehingga animo petani untuk bertanam meningkat dan melakukan perawatan.

2. Penurunan

Terjadinya penurunan produksi diakibatkan dari berkurangnya bantuan benih dibanding tahun sebelumnya. Faktor utama lain yang mengakibatkan berkurangnya produksi adalah dampak data luas baku lahan sawah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN RI. Dengan berkurangnya luas baku lahan sawah, maka alokasi bantuan benih dan pupuk mengalami penurunan. Hal ini mempengaruhi terhadap luas tanam pada komoditas tersebut, sehingga produksi mengalami penurunan.

Pada beberapa komoditas hortikultura, terjadinya penurunan produksi selain berkurangnya atau tidak adanya bantuan benih/bibit, juga disebabkan oleh faktor musim dan cuaca yang tidak mendukung, terjadinya penurunan harga jual sehingga tidak adanya perawatan dari petani dan animo petani untuk bertanam menjadi berkurang, usia tanaman yang sudah tua dan adanya peremajaan serta adanya serangan hama penyakit tanaman.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah/ Kewenangan Provinsi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Tugas Pembantuan.
2. Fungsi Pokok Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
 - a. Perumusan kebijakan sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi kebijakan sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembahasan Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel rangkuman berikut ini :

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	1. Jumlah Produksi Tanaman Pangan											Masih rendahnya capaian produksi disebabkan oleh adanya perubahan jadwal tanam sehingga menyebabkan pergeseran panen, adanya alih fungsi lahan sawah sedangkan pada produktivitas sangat dipengaruhi oleh faktor irigasi, saprodi dan pengendalian hama penyakit
		Produksi Padi (ton GKG)											
		sebelum	5.343.688	5.450.562	5.559.573	5.670.764	5.784.180	4.693.563	4.200.112				
		sesudah			3.906.872	3.985.007	4.064.705			3.926.768	3.986.057	4.064.705	
		Produksi Jagung (ton pipilan kering)											
		sebelum	1.811.605	1.847.837	1.884.794	1.922.490	1.960.939	1.960.424	1.965.444				
		sesudah			1.597.073	1.624.357	1.706.549			1.701.235	1.806.544	1.706.549	
		Produksi Kedele (ton)											
		Sebelum	8.905	9.528	10.195	10.909	11.673	9.627	4.003				
		Sesudah			4.052	4.145	4.244			1.613	8.214	4.244	
		2. Jumlah Produktivitas tanaman Pangan											
		- Padi (Ton/Ha)											
		sebelum	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	4,66	5,10				
		sesudah			5,17	5,24	5,25			5,20	5,35	5,25	
		- Jagung (TonHa)											
		sebelum	6,19	6,20	6,20	6,20	6,20	6,14	6,12				
		sesudah			6,21	6,25	6,38			6,28	6,25	6,38	
		- Kedele (Ton/Ha)											
		sebelum	1,30	1,31	1,31	1,32	1,32	1,73	1,56				
		sesudah			1,58	1,58	1,58			1,70	1,58	1,58	
		3. Jumlah Produksi tanaman hortikultura											Pada bawang merah terjadi peningkatan produksi karena dampak dari bantuan dari
		- Bawang Merah (Ton)	16.918	17.341	17.775	18.219	18.675	18.072	29.222	51.655	64.473	18.675	
		- Cabe (Ton)	168.822	173.887	179.103	184.476	190.011	154.008	193.862	204.425	220.086	190.011	
		- Sayur-Sayuran (Ton)	998.498	1.008.483	1.018.568	1.028.754	1.039.041	1.130.462	1.270.084	1.438.445	1.209.106	1.039.041	
		- Buah – Buahan (Ton)	1.180.230	1.193.213	1.206.338	1.219.608	1.233.024	1.107.154	1.249.380	1.717.199	1.478.901	1.233.024	

No	Indikator	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
		4. Jumlah Produktivitas tanaman hortikultura											pemerintah serta adanya food estate sedangkan pada komoditas lainnya dipengaruhi oleh faktor harga jual di tingkat petani
		-Bawang Merah (Ton/hektar)	7,89	7,99	8,08	8,18	8,28	8,05	9,55	12,33	15,18	8,28	
		- Cabe (Ton/hektar)	9,91	10,02	10,13	10,24	10,36	9,61	10,48	13,34	12,60	10,36	
	Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat											
		Sebelum	90,40	92,30	94,30	96,30	98,10	89,6	83,8				
		Sesudah			86,68	89,59	92,50			85,0	87,2	92,5	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Provinsi Sumatera Utara.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut.

1. Tingginya kerusakan infrastruktur pertanian khususnya jaringan irigasi. Kerusakan jaringan irigasi di Sumatera Utara. Luas lahan sawah di Sumatera Utara pada tahun 2022 mencapai 348.204 ha dengan lahan irigasi sebesar 221.477 ha. Kerusakan jaringan irigasi rusak sedang mencapai sebesar 30 % dan rusak berat mencapai 23 %.
2. Sarana produksi pertanian belum tersedia secara 6 tepat (jumlah, kualitas, harga, jenis, tempat, dan waktu)
3. Sumber daya manusia petani yang rendah dan didominasi oleh generasi tua. Berdasarkan Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) tahun 2018 oleh BPS Provinsi Sumatera Utara, usia rumah tangga pertanian di Sumatera Utara dengan usia lebih dari 45 tahun mencapai 65 %.
4. Kelembagaan petani masih lemah terutama dalam kemampuan akses terhadap permodalan dan informasi pasar
5. Nilai tukar petani (NTP) pangan dan hortikultura masih belum mencapai 100. Pada tahun 2022, Nilai Tukar Petani (NTP) padi palawija mencapai 95,57 dan Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura mencapai 93,28.
6. Mutu dan kualitas produk pertanian relatif masih rendah
7. Terjadinya degradasi terhadap lahan pertanian dan penerapan teknologi belum optimal

8. Rantai Tata Niaga yang masih panjang
9. Pendampingan dan pengawalan petani oleh penyuluh/ petugas lapangan belum optimal
10. Belum optimalnya kegiatan hilirisasi produk-produk pertanian sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
11. Belum optimalnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
12. Rendahnya pengawasan pangan yang beredar
13. Fluktuasi harga komoditas pangan tertentu

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura merupakan tugas secara umum Perangkat Daerah yang dirumuskan kedalam tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura dibutuhkan sinergi antar perangkat daerah lingkup pertanian di provinsi, kabupaten/kota serta Kementerian dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

2.3. Review Terhadap RKPD Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

Analisa kajian terhadap RKPD Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dilakukan untuk membandingkan antara RKPD dengan hasil kebutuhan. Kajian ini dimaksudkan untuk menggambarkan skala Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penyusunan review ini dimulai dengan merumuskan rencana program dan kegiatan dari masing-masing unit Eselon III yang dilanjutkan dengan menjabarkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara tersebut kedalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Rencana Kerja tersebut, maka akan diajukan dan untuk disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai Rencana Kerja tersebut. Dari Rencana Kerja yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Adapun Kajian Terhadap RKPD Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel Review Terhadap RKPD Provinsi Sumatera Utara.

Tabel T-C.31 Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumatera Utara

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Ranwal RKPD			Hasil analisis Kebutuhan		
						Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura			182.505.000.000			167.066.940.608
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			111.025.000.000			108.246.696.300
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			111.025.000.000			108.246.696.300
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			108.475.000.000			104.946.696.300
2	09	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.830.000.000			3.830.000.000
2	09	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	900.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	900.000.000
2	09	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.950.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.950.000.000
2	09	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	980.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	980.000.000
2	09	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			87.025.000.000			83.496.696.300
2	09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang/ Bulan	87.000.000.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang/ Bulan	83.471.696.300
2	09	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	1 Laporan	25.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	1 Laporan	25.000.000

RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
2	09	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			500.000.000			500.000.000
2	09	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	500.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	500.000.000
2	09	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			400.000.000			400.000.000
2	09	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	400.000.000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	400.000.000
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.500.000.000			1.500.000.000
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	600.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	600.000.000
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	120.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	120.000.000
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000
2	09	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	60.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	60.000.000
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	600.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	600.000.000
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.420.000.000			13.420.000.000

2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	900.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	900.000.000
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.500.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.500.000.000
2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.800.000.000			1.800.000.000
2	09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	700.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	700.000.000
2	09	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	800.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	800.000.000
2	09	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	300.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	300.000.000
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			2.050.000.000			2.500.000.000
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			1.000.000.000			1.200.000.000
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	500.000.000	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	700.000.000
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan	1 Laporan	500.000.000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan	1 Laporan	500.000.000

						Lainnya			Lainnya		
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			600.000.000			600.000.000
2	09	03	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	1 Laporan	600.000.000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	1 Laporan	600.000.000
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi			450.000.000			700.000.000
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	450.000.000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	700.000.000
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			500.000.000			800.000.000
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			500.000.000			800.000.000
2	09	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1 Dokumen	500.000.000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1 Dokumen	800.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			71.480.000.000			58.820.244.308
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			71.480.000.000			58.820.244.308
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			37.000.000.000			30.078.303.700
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						700.000.000
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah					700.000.000

					Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi						
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			37.000.000.000			29.378.303.700
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan	25.000.000.000	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan	29.378.303.700
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen	12.000.000.000	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen	12.000.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			21.900.000.000			15.661.940.608
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			21.900.000.000			15.661.940.608
3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	900.000.000	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	

3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	8.000.000.000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	4.000.000.000
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	8.000.000.000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	6.661.940.608
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	5.000.000.000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	5.000.000.000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			530.000.000			530.000.000
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			530.000.000			530.000.000
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	450 Ha	200.000.000	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	450 Ha	200.000.000
3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	330.000.000	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	330.000.000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			12.050.000.000			12.550.000.000
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			8.700.000.000			10.700.000.000
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1.300.000.000	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	3.300.000.000
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	632 Kelompok	7.400.000.000	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	632 Kelompok	7.400.000.000
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas						1.850.000.000

					Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			3.350.000.000			
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	10 Unit	950.000.000	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	10 Unit	
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1 Laporan	500.000.000	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1 Laporan	500.000.000
3	27	07	1.03	03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	50 Unit	400.000.000	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	50 Unit	
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	30 Unit	1.500.000.000	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	30 Unit	1.350.000.000
					UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Arse Sipirok			1.900.000.000			6.450.000.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			600.000.000			600.000.000
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			600.000.000			600.000.000
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			600.000.000			600.000.000
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			600.000.000			600.000.000
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.300.000.000			5.850.000.000
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.300.000.000			5.850.000.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			850.000.000			850.000.000
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			850.000.000			850.000.000

3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan	600.000.000	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan	600.000.000
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen	250.000.000	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen	250.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			450.000.000			5.000.000.000
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			450.000.000			5.000.000.000
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	450.000.000	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000.000
					UPTD Benih Induk Hortikultura Kutagadung			2.500.000.000			1.700.000.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			500.000.000			600.000.000
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			500.000.000			600.000.000
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			500.000.000			600.000.000
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			500.000.000			600.000.000
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	500.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			2.000.000.000			1.100.000.000
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN						1.100.000.000

					BIDANG PERTANIAN			2.000.000.000			
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1.100.000.000			1.100.000.000
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			1.100.000.000			1.100.000.000
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan	1.100.000.000	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan	1.100.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			900.000.000			0
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			900.000.000			0
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	450.000.000	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	0
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	450.000.000	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	0
					UPTD Benih Induk Hortikultura Gedung Johor			5.300.000.000			12.342.206.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			850.000.000			850.000.000
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			850.000.000			850.000.000
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			850.000.000			850.000.000
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			850.000.000			850.000.000
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1 Laporan	850.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1 Laporan	850.000.000

						Disediakan			Disediakan		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4.450.000.000			11.492.206.000
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			4.450.000.000			11.492.206.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			2.000.000.000			2.000.000.000
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			2.000.000.000			2.000.000.000
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan	2.000.000.000	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan	2.000.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			2.450.000.000			9.492.206.000
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			2.450.000.000			9.492.206.000
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	2.000.000.000	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	0
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	450.000.000	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	9.492.206.000
					UPTD Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura			2.200.000.000			3.350.000.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			650.000.000			700.000.000
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			650.000.000			700.000.000
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			650.000.000			700.000.000
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			650.000.000			700.000.000

					Pemerintahan Daerah						
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	650.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	700.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.550.000.000			2.650.000.000
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.550.000.000			2.650.000.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			650.000.000			650.000.000
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			650.000.000			650.000.000
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	1 Sertifikat	650.000.000	Jumlah Sertifikat Benih	1 Sertifikat	650.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			900.000.000			2.000.000.000
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			900.000.000			2.000.000.000
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	450.000.000	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	0
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	450.000.000	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000.000
					UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Gabe Hutaraja			1.600.000.000			1.700.000.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			500.000.000			600.000.000
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			500.000.000			600.000.000
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			500.000.000			600.000.000

					PROVINSI						
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			500.000.000			600.000.000
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	500.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.100.000.000			1.100.000.000
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.100.000.000			1.100.000.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			650.000.000			1.100.000.000
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			650.000.000			1.100.000.000
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan	350.000.000	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan	500.000.000
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen	300.000.000	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen	600.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			450.000.000			0
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			450.000.000			0
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	450.000.000	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	0
					UPTD Benih Induk Padi Tanjung Morawa			2.010.000.000			9.610.000.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			600.000.000			650.000.000

2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			600.000.000			650.000.000
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			600.000.000			650.000.000
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			600.000.000			650.000.000
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	650.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.410.000.000			8.960.000.000
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.410.000.000			8.960.000.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			960.000.000			960.000.000
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			960.000.000			960.000.000
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen	960.000.000	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen	960.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			450.000.000			8.000.000.000
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			450.000.000			8.000.000.000
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	450.000.000	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	8.000.000.000
					UPTD Benih Induk Palawija Tanjung Selamat			1.600.000.000			1.150.000.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN			650.000.000			650.000.000

					PELAYANAN DASAR						
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			650.000.000			650.000.000
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			650.000.000			650.000.000
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			650.000.000			650.000.000
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	650.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	650.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			950.000.000			500.000.000
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			950.000.000			500.000.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			500.000.000			500.000.000
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			500.000.000			500.000.000
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen	500.000.000	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen	500.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			450.000.000			0
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			450.000.000			0
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	450.000.000	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	0
					UPTD Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pengawasan Mutu Keamanan			4.100.000.000			3.600.000.000

					Pangan						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.200.000.000			2.400.000.000
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			2.200.000.000			2.400.000.000
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1.900.000.000			1.900.000.000
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.900.000.000			1.900.000.000
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.900.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.900.000.000
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			300.000.000			500.000.000
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000			500.000.000
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	1 Dokumen	300.000.000	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	1 Dokumen	500.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.900.000.000			1.200.000.000
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.900.000.000			1.200.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			900.000.000			0
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			900.000.000			0
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	450.000.000	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	0
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan	1 Unit	450.000.000	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan	1 Unit	0

					Pendukungnya	Direhabilitasi			Direhabilitasi		
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			1.000.000.000			1.200.000.000
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			1.000.000.000			1.200.000.000
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1500 Ha	750.000.000	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1500 Ha	950.000.000
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	160 Ha	250.000.000	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	160 Ha	250.000.000
					UPTD Pelatihan dan Mekanisasi Pertanian			2.050.000.000			2.250.000.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.000.000.000			1.000.000.000
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			1.000.000.000			1.000.000.000
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1.000.000.000			1.000.000.000
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.000.000.000			1.000.000.000
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.050.000.000			1.250.000.000
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.050.000.000			1.250.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN						300.000.000

					PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			300.000.000			
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			300.000.000			300.000.000
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	300.000.000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	300.000.000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			750.000.000			950.000.000
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			750.000.000			450.000.000
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	450.000.000			
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	300.000.000			
3	27	07	1.01	04	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Persentase Kelompok tani dengan peningkatan kelasnya					450.000.000
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						500.000.000
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Persentase Kelompok tani dengan peningkatan kelasnya					500.000.000
TOTAL								205.765.000.000	TOTAL		209.219.146.608

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara ini dilakukan melalui pendekatan *politik, teknokratik, partisipatif, top down* dan *bottom up*, sehingga di dalamnya tercantum indikator keluaran, hasil dan manfaat dari pembangunan pertanian yang berorientasi perdesaan.

Penetapan strategi dan kebijakan umum serta perumusan program dilaksanakan melalui evaluasi pembangunan Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berorientasi pedesaan dari masing-masing bidang Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Bidang-bidang yang berada dalam lingkup Perangkat Daerah Dinas Ketahanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara melakukan penelaahan terhadap situasi saat ini dan membuat peramalan serta proyeksi pembangunan Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berorientasi pedesaan pada desa-desa miskin yang berbasis pertanian di Provinsi Sumatera Utara, dengan harapan dapat dipilih beberapa desa sasaran yang tepat sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

Program di atas merupakan program prioritas dalam mencapai swasembada pangan di Provinsi Sumatera Utara. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat diperoleh dengan cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai tingkat Kabupaten/Kota hingga Tingkat Provinsi.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat diantaranya berasal dari Pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD tahun 2023. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2024 berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan juga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yang telah tercantum dalam Rencana Strategis yaitu ***"Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Berdasarkan hasil pokok-pokok pikiran yang masuk kedalam urusan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura"*** dan ***"Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat"*** bentuk usulan sebanyak 687 usulan yang terdiri dari :

1. Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) sebanyak 270 usulan

2. Bantuan bibit pohon/buah/MPTS sebanyak 1 usulan
3. Bantuan Bibit Tanaman sebanyak 72 usulan
4. Bantuan Pupuk sebanyak 137 usulan
5. Pembangunan Jalan Usaha Tani sebanyak 119 usulan
6. Pembangunan jaringan irigasi Pertanian sebanyak 39 usulan
7. Pembuatan Rumah Sampah (Pupuk Kompos) sebanyak 15 usulan
8. Pengadaan Bibit sebanyak 32 usulan
9. Pengembangan Padi Organik sebanyak 1 usulan
10. Revitalisasi Persawahan sebanyak 1 usulan

Selain itu juga Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat berasal dari Hasil Musrenbang Lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura se-Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan oleh Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Berikut adalah kegiatan prioritas yang akan menjadi usulan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang menangani urusan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura pada saat penyelenggaraan Musrenbang Lingkup Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kota se Sumatera Utara.

Tabel 2.7 Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Rencana Kegiatan Sumber Dana APBD Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumatera Utara

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan/ Rincian Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Total Pengajuan (Rp)
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
3 27 021	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura					
	Pengembangan Budidaya Bawang Merah (Benih Bawang Merah 1.000 Kg, Pupuk Organik 4.000 Kg, Pupuk Hayati Cair 8 Ltr)	Kab/	Ha	66,760,000	APBD	52,473,360,000
	Pengembangan Budidaya Cabai (Benih Cabai Merah 10 Sachet, Plastik Mulsa 20 Glg, Pupuk Kompos 3.000 Kg, Pupuk Hayati Cair 6 Liter)	kota	Ha	20,460,000	APBD	24,265,560,000

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan/ Rincian Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Total Pengajuan (Rp)
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	
	Pengembangan Budidaya Kentang (Benih 1.000 Kg, Pupuk Organik 4.000 Kg, Pupuk Hayati Cair 6 Liter)	Kab/	Ha	48,480,000	APBD	40,480,800,000
	Pengembangan Budidaya Jahe (Benih 1.000 Kg, Pupuk Organik 4.000 Kg, Pupuk Hayati Cair 6 Ltr)	kota	Ha	46,980,000	APBD	12,073,860,000
	Pengembangan Budidaya Durian (Bibit 1 Batang, Pupuk Organik 5 Kg)	Kab/	Batang	59,500,000	APBD	9,139,200,000
	Pengembangan Budidaya Buah Mangga (Bibit 1 Batang, Pupuk Organik 5 Kg)	kota	Batang	59,500,000	APBD	5,504,940,000
	Pengembangan Budidaya Jeruk (Bibit 1 Batang, Pupuk Organik 5 Kg)	Kab/	Batang	64,500,000	APBD	10,336,125,000
	Pengembangan Budidaya Alpukat (Bibit 1 Batang, Pupuk Organik 5 Kg)	kota	Batang	59,500,000	APBD	7,431,550,000
	Pengembangan Penangkar Bawang Merah (Benih 1.000 Kg, Pupuk Organik 3.000 Kg, Trichoderma 50 Kg)	Kab/	Ha	73,400,000	APBD	12,478,000,000
	Pengembangan Penangkar Kentang (Benih 20.000 Knol, Pupuk Organik 3.000 Kg)	kota	Ha	88,400,000	APBD	3,447,600,000
	Pembangunan Sarana Pasca Panen (Bangsal Bawang)	Kab/	Unit	200,000,000	APBD	9,600,000,000
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan					
	Pengembangan Budidaya Padi (Benih Padi 25 Kg)	Kab/	Ha	275,000	APBD	18,671,675,000
	Pengembangan Budidaya Jagung (Benih Jagung 15 Kg)	kota	Ha	2,175,000	APBD	195,373,725,000
	Pengembangan Budidaya Ubi Jalar (Pupuk Organik 1.000 Kg)	Kab/	Ha	2,800,000	APBD	2,228,800,000
	Pengembangan Budidaya Ubi Kayu (Pupuk Organik 1.000 Kg)	kota	Ha	2,800,000	APBD	5,149,200,000
	Pengembangan Budidaya Kedelai (Benih 40 Kg, Pupuk Organik 1.000 Kg)	Kab/	Ha	3,520,000	APBD	3,481,280,000
	Pengembangan Budidaya Kacang Tanah (Benih 120 Kg,	kota	Ha	6,040,000	APBD	8,733,840,000

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan/ Rincian Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Total Pengajuan (Rp)
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	
	Pupuk Organik 1.000 Kg)					
	Pengembangan Budidaya Kacang Hijau (Benih 25 Kg, Pupuk Organik 1.000 Kg)	Kab/kota	Ha	3,350,000	APBD	2,753,700,000
	Pengembangan Penangkar Padi 1 Unit/20 Ha (Benih 500 Kg, Pupuk Organik 20 Ton, Pestisida 100 Liter, Terpal Jemur 1 Buah, Seed Cleaner 1 Unit)	Kab/kota	Unit	116,700,000	APBD	6,185,100,000
	Pembangunan Rumah Kompos (APPO, Kendaraan Angkut Roda 3, Rumah Kompos)	Kab/kota	Unit	267,500,000	APBD	28,890,000,000
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
3 27 031	Penataan Prasarana Pertanian					
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian					
	Pengadaan Pupuk Organik/Kompos	Kab/kota	Ton	2,800,000	APBD	31,805,200,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani					
	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Kab/kota	Unit	200,000,000	AP	106,800,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani					
	Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dan Kwartir	Kab/kota	Unit	200,000,000	APBD	70,600,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					
	Cultivator	Kab/kota	Unit	20,000,000		15,240,000,000
	Combine Harvester	kota	Unit	450,000,000		33,750,000,000
	Hand Traktor	Kab/kota	Unit	35,000,000		25,515,000,000
	Hand Sprayer	kota	Unit	800,000		3,937,600,000
	Power Tresher	Kab/kota	Unit	35,000,000		18,970,000,000
	Alat tanam jagung	kota	Unit	3,158,000		3,022,206,000
	Corn Sheller	Kab/kota	Unit	30,000,000		11,460,000,000
	Appo	kota	Unit	30,500,000		5,612,000,000
	Mesin Pompa Air	Kab/kota	Unit	10,000,000		4,120,000,000
3 27 05	PROGRAM					

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan/ Rincian Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Total Pengajuan (Rp)
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	
	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
3 27 051	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					
	Pengadaan Pestisida	Kab/kota	Kg	180,000	APBD	8,731,800,000
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
3 27 07 1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					
3 27 07 1.03 04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani					
	Demoplot Budidaya Bawang Merah (Benih 250 Kg, EM4 12 Ltr, Mulsa 6 Glg, Pupuk NPK 75 Kg, Pestisida 5 Ltr, Pupuk Hayati Trichoderma 10 Kg, Pupuk Organik Padat 1.200, Pupuk Organik Cair 10 Ltr)	Kab/kota	Paket	26,122,000	APBD	8,045,576,000
	Demo Plot Budidaya Bawang Putih (Benih 250 Kg, Mulsa 6 Glg, Pupuk NPK 50 Kg, Pupuk Hayati Trichoderma 10 Kg, Pupuk Organik Padat 1.000 Kg, Pupuk Organik Cair 8 Ltr)	Kab/kota	Paket	27,115,000	APBD	921,910,000
	Demoplot Budidaya Cabai (Benih 9 Sachet, Mulsa 6 Glg, Pupuk NPK 60 Kg, Pupuk Hayati Trichoderma 12 Kg, Pupuk Organik Padat 1.200 Kg, Pupuk Organik Cair 12 Ltr)	Kab/kota	Paket	11,868,000	APBD	5,494,884,000
	Demoplot Budidaya Kedelai (Benih 25 Kg, Pupuk NPK 20 Kg, Pupuk Hayati Tricoderma 5 Kg, Pupuk Organik Padat 500 Kg, Pupuk Organik Cair 5	Kab/kota	Paket	3,757,000	APBD	251,719,000

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan/ Rincian Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Total Pengajuan (Rp)
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	
	Ltr)					
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
2 09 03.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokokatau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
	Bantuan Saprodi aneka Sayur dan rumah Benih	Kab/ Kota	Paket	25,000,000	APBD	4,125,000,000
2.09.03.1.0 2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					
2.09.03.1.0 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi					
	Pengadaan Gabah Lumbung Pangan	Kab/ Kota	Kg	6,500	APBD	2,626,000,000
2.09.03.1.0 4	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi					
2.09.03.1.0 4.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)					
	Bantuan peralatan pengolahan Dapur B2SA (Kompas Gas, Kual, Blender, alat pengiris, dll)	Kab/ Kota	Paket	20,000,000		3,480,000,000
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
2 09 042	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi					
	Penanganan Daerah Rawan Pangan berupa Bantuan Bahan Pangan (Beras, Susu dll) untuk pengentasan stunting	Kab/ kota	Paket	10,000,000	APBD	13,080,000,000

Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan/ Rincian Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Total Pengajuan (Rp)
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	
	Penanganan Daerah Rawan Pangan berupa Bantuan Bahan Pangan (Beras, Susu dll) untuk pengentasan Gizi Buruk	Kab/kota	Paket	10,000,000	APBD	9,800,000,000
	Penanganan Daerah Rawan Pangan berupa Bantuan Bahan Pangan (Beras, Susu dll) untuk pengentasan Kurang Gizi	Kab/kota	Paket	10,000,000	APBD	9,550,000,000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
2.09.051	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	Penerbitan Sertifikat Prima 3	Provsu	Paket	20,000,000	APBD	2,780,000,000
	Bantuan alat uji mutu keamanan pangan (Rapid Test)	Provsu	Paket	20,000,000	APBD	2,720,000,000

Sumber : Aplikasi perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara 2023

BAB - III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Kebijakan pembangunan daerah merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, sebagai arah bagi Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kebijakan Pembangunan Daerah disusun selain berdasarkan Strategi Pembangunan Daerah Gubernur Terpilih sesuai visi dan misinya, juga mengacu pada Agenda Pembangunan Nasional (RPJM Nasional) dan Provinsi Sumatera Utara (Dokumen Perencanaan Daerah Sumatera Utara).

Agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemahan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Kementerian Pertanian dalam Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke 2 yaitu mewujudkan struktur ekonomi yang

produktif, mandiri dan berdaya saing yang tertuang dalam melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianyaprasarana dan sarana pertanian,
4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima

Salah satu strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk untuk mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing adalah dengan "Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian". Sejalan dengan kebijakan pembangunan pertanian tersebut, Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara juga turut berperan dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui penetapan tujuan Perangkat Daerah yaitu ***Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura*** dan ***Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat*** yang sesuai dengan Peran dan Fungsi Perangkat Daerah.

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam RPD adalah sebagai berikut.

Tabel Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Tema		
Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mengoptimisasi Peningkatan Kualitas SDM, Ekonomi Inklusif, Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Akselerasi Pencapaian Target Kualitas SDM, Ekonomi Inklusif, Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemantapan Pencapaian Target Kualitas SDM, Ekonomi Inklusif, Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Program pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024- 2026, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 serta dengan mempertimbangkan isu-isu internasional, isu-isu nasional dan isu-isu daerah. **Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2024-2026 pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026** adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis tanaman pangan dan tanaman hortikultura, ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi aspek produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura, prasarana dan sarana, ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024–2026, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan tujuan yaitu :

1. ***Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura*** dengan sasaran yaitu ***Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.***
2. ***Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat*** dengan sasaran yaitu ***Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat.***

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Adapun tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025 ialah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang produktif, mandiri, berdaya saing ekonomi dan sosial, berkeadilan dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang demokratis, bersih dan jujur, dengan sasaran ditujukan kepada :

- (1) Meningkatkan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya yang membawa masyarakat Sumatera Utara semakin sejahtera,
- (2) Terwujudnya Sumut yang demokratis berlandaskan hukum
- (3) Terwujudnya rasa aman dan damai serta terlindunginya semua kepentingan yang merupakan hak masyarakat
- (4) Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
- (5) Terwujudnya Sumut yang asri dan lestari
- (6) Terwujudnya masyarakat Sumut yang bermoral, beretika, beriman dan berbudaya

Arah kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mengoptimalisasi Peningkatan Kualitas SDM, Ekonomi Inklusif, Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan
- 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
- 3) Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif

Berdasarkan 4 prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara tersebut, Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara memiliki peran dalam prioritas ke-2 yaitu :

2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Penurunan alih Fungsi Lahan	1. Peningkatan kepemilikan lahan petani 2. Peningkatan akses pembiayaan 3. Penurunan biaya operasional pertanian
			Peningkatan nilai	1. Peningkatan skill

			tambah sektor pertanian	<p>petani dalam pengolahan hasil pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan kerjasama antar daerah sektor pertanian 3. Optimalnya Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan 4. Peningkatan fasilitas teknologi pengolahan hilirisasi produk pertanian
			Peningkatan Kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Akses Jalan Produksi Pertanian 2. Optimalisasi Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi (Ha) 3. Optimalnya Pemberian Bantuan Benih/Bibit dan Pupuk <p>Pertanian Optimalnya Pemberian Bantuan Alat Mesin Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan
			Peningkatan Produktivitas pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan benih/bibit unggul yang bersertifikat 2. Peningkatan Penerapan teknologi pertanian 3. Belum optimalnya Peningkatan Diversifikasi Pertanian 4. Tingginya serangan

				<p>organisme pengganggu (tanaman, ternak, ikan)</p> <p>5. Belum optimalnya Pengawasan Peredaran & Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian</p>
			Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan petani	<p>1. Rendahnya penguasaan teknologi pertanian</p> <p>2. Rendahnya kualitas penyuluhan petani</p> <p>3. Belum optimalnya Kelembagaan Petani Pengelolaan dan Penggunaan Air</p> <p>4. Rendahnya minat menjadi petani</p> <p>5. Rendahnya Pemberdayaan Kelembagaan Petani (Poktan/Gapoktan dan P3A/GP3A/IP3)</p> <p>6. Belum optimalnya Pelatihan Sekolah Lapang</p>

Sekaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 - 2026, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yaitu :

Tujuan : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan petani

Sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Prioritas ke-2 : **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**, terdapat kegiatan Strategis Daerah terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yaitu :

1. Pengembangan Kawasan Pertanian Terintegrasi Menuju swasembada beras & jagung serta peningkatan produksi cabe merah, bawang merah.
2. Pembentukan Petani Muda Milenial

Dalam kegiatan strategis daerah tersebut, terdapat 4 (empat) komoditas strategis pangan utama yang menjadi fokus pencapaian swasembada pangan yaitu beras, jagung, cabai dan bawang merah sampai dengan akhir RPD di tahun 2026. Untuk mendukung target tersebut, Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan 5 (lima) komoditas tanaman pangan dan hortikultura strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis yang menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian swasembada pangan di Provinsi Sumatera Utara yaitu Padi, Jagung, Kedelai, Bawang Merah dan Cabai

3.2.1 TUJUAN DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis pembangunan pertanian.

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan tujuan yaitu :

1. *Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.*
2. *Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat.*

3.2.2 SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan tanaman pangan dan hortikultura yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan sasaran yaitu

1. *Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.*
2. *Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat.*

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara menetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Jumlah Produksi Tanaman Pangan (padi, jagung dan kedelai)
2. Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan (padi, jagung dan kedelai)

3. Jumlah Produksi Hortikultura (bawang merah, cabai, sayur-sayuran dan buah-buahan)
4. Jumlah Produktivitas Hortikultura (bawang merah dan cabai)
5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Penetapan Indikator Kinerja tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

TUJUAN	SASARAN	KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA 2024
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Jumlah Produksi tanaman Pangan	
		- Padi (Ton GKG)	4.013.809
		- Jagung (ton pipilan kering)	1.811.970
		- Kedele (ton)	8.258
		2. Jumlah Produktivitas tanaman Pangan	
		- Padi (Ton/Ha)	5,36
		- Jagung (TonHa)	6,26
		- Kedele (Ton/Ha)	1,59
		3. Jumlah Produksi hortikultura	
		- Bawang Merah (Ton)	32.158
		- Cabe (Ton)	197.696
		- Sayur-Sayuran (Ton)	1.052.549
		- Buah – Buahan (Ton)	1.249.053
		4. Jumlah Produktivitas hortikultura	
		- Bawang Merah (Ton//Ha)	13,75
		- Cabe (Ton/Ha)	10,58
Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat	5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Poin)	88,22

Adapun formula pengukuran indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Lampiran dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 pada Tabel T-A.1. Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

No	Bidang Urusan/ Indikator	Rumus
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
28.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	$PPH = \% \text{ Angka Kecukupan Gizi (AKG) } \times \text{ bobot masing-masing kelompok pangan}$
33.	Produksi sektor Pertanian	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian (Ton)
ASPEK LAYANAN UMUM		
2.5.	Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	$\frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas Areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}}$

BAB - IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA

4.1. Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Untuk mewujudkan Prioritas ke-2 Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yaitu " **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif** " yang diwujudkan melalui tujuan/sasaran Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara "**Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura**" dan "**Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat**", maka ditetapkan Program Prioritas yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Utama masing-masing Unit Eselon III Lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

Rencana Program Prioritas pada Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
7. Program Penyuluhan Pertanian.

Selain program prioritas tersebut, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, juga terdapat program pendukung yaitu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Adapun indikator kinerja Program Program Prioritas Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Dengan sasaran program yaitu "Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat" dan indikator sasaran Skor PPH Konsumsi

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
Dengan sasaran program yaitu "Penurunan Daerah Rawan Pangan dan Gizi" dan indikator sasaran Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
Dengan sasaran program yaitu "Meningkatnya keamanan pangan masyarakat" dan indikator sasaran Persentase kenaikan unit usaha yang memiliki sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Dengan sasaran program yaitu "Terpenuhinya kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura" dan indikator sasaran :
 - a. Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan
 - b. Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Dengan sasaran program yaitu " Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Prasarana Pertanian " dan indikator sasaran :
 - a. Persentase Lahan Sawah yang diairi jaringan Irigasi
 - b. Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui
 - c. Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian
6. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Dengan sasaran program yaitu " Terkendalinya Luas Serangan OPT/DPI tanaman pangan dan hortikultura " dan indikator sasaran : Luas Pengendalian Serangan OPT/DPI.
7. Program Penyuluhan Pertanian
Dengan sasaran program yaitu " Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian " dan indikator sasaran :
 - a. Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani
 - b. Persentase Kelompok Tani dengan peningkatan kelasnya

Berikut adalah tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						167.066.940.608,00							191.245.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						108.246.696.300,00							120.195.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						108.246.696.300,00							120.195.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPA Perubahan dan Rapat Koordinasi virtual Penyusunan Dokumen Perencanaan Pertemuan Penyusunan Eproposal dan Eplanning Pertemuan Penyusunan RKA dan DPA Pertemuan Rakortek Lingkup Dinas TPH	-			7 Dokumen	104.946.696.300,00						-	117.195.000.000,00	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.830.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	3.910.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	900.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		950.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.950.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		1.970.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	980.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		990.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	83.496.696.300,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	95.030.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				600 Orang/ Bulan	83.471.696.300,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		95.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	500.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	400.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.500.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	1.630.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	600.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		650.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	120.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	60.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	600.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		650.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13.420.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	13.725.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	900.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12.500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		12.700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.800.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	1.850.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				50 Unit	700.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	800.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR PPH KONSUMSI	89,25 POIN			88,22 POIN	2.500.000.000,00						88,7 POIN	2.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-				1.200.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	1.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	700.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-	-				600.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1 Laporan	600.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-	-				700.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1 Laporan	700.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	2 %			2 %	800.000.000,00						2 %	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	-	-				800.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	800.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						58.820.244.308,00							71.050.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						58.820.244.308,00							71.050.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi	12,35 % 3,17 % 2,75 % 2,62 % 0,75 % 3,46 % 2,25 %			3,3 % 12,19 % 2,19 % 0,67 % 2,3 % 1,94 % 2,72 %	30.078.303.700,00						12,32 % 2,95 % 2,35 % 2,46 % 0,73 % 3,38 % 2,24 %	35.950.000.000,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-			-	700.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	950.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	700.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		950.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-				29.378.303.700,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	35.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 laporan	29.378.303.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		35.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui Persentase Lahan Sawah yang dialiri jaringan irigasi Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian	0,16 % 12,5 % 0,2 %			10 % 0,12 % 0,13 %	15.661.940.608,00						0,14 % 11,25 % 0,16 %	24.000.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-				15.661.940.608,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	24.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				1 Dokumen	4.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		9.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				1 Dokumen	6.661.940.608,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		9.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	5.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		6.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Pengendalian Serangan OPT	411594 Ha			508141 Ha	530.000.000,00						457327 Ha	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-				530.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				450 Ha	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				1 Laporan	330.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok tani dengan peningkatan kelasnya Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani	90 % 0,75 %			0,65 % 90 %	12.550.000.000,00						90 % 0,7 %	10.550.000.000,00	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-				10.700.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	9.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				30 Dokumen	3.300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		1.600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				632 Kelompok	7.400.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		7.400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-				1.850.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	1.550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				1 Unit	500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				10 Unit	1.350.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		950.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK						6.450.000.000,00							1.950.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						600.000.000,00							650.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						600.000.000,00							650.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	600.000.000,00						-	650.000.000,00	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	650.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	600.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		650.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.850.000.000,00							1.300.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						5.850.000.000,00							1.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi</i>	12,35 % 3,17 % 2,75 % 2,62 % 0,75 % 3,46 % 2,25 %			3,3 % 12,19 % 2,19 % 0,67 % 2,3 % 1,94 % 2,72 %	850.000.000,00						12,32 % 2,95 % 2,35 % 2,46 % 0,73 % 3,38 % 2,24 %	850.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-				850.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	850.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
3.27.02.1.02.0007		Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				1 Batang	600.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		600.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
3.27.02.1.02.0009		Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak				1 Setek	250.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		250.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui Persentase Lahan Sawah yang dialiri jaringan Irigasi Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian</i>	0,16 % 12,5 % 0,2 %			10 % 0,12 % 0,13 %	5.000.000.000,00						0,14 % 11,25 % 0,16 %	450.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-				5.000.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
3.27.03.1.01.0010		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN ARSE SIPIROK
		UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG						1.700.000.000,00							2.700.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						600.000.000,00							600.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						600.000.000,00							600.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	600.000.000,00						-	600.000.000,00	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	600.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	600.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		600.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.100.000.000,00							2.100.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.100.000.000,00							2.100.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi	12,35 % 3,17 % 2,75 % 2,62 % 0,75 % 3,46 % 2,25 %			3,3 % 12,19 % 2,19 % 0,67 % 2,3 % 1,94 % 2,72 %	1.100.000.000,00						12,32 % 2,95 % 2,35 % 2,46 % 0,73 % 3,38 % 2,24 %	1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-				1.100.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	1.200.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				1 Ton	1.100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		1.200.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui Persentase Lahan Sawah yang dialiri jaringan Irigasi Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian	0,16 % 12,5 % 0,2 %			10 % 0,12 % 0,13 %	0,00						0,14 % 11,25 % 0,16 %	900.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-				0,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	900.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG
		UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR						12.342.206.000,00							3.800.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						850.000.000,00							900.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						850.000.000,00							900.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	850.000.000,00						-	900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	850.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	900.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	850.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		900.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						11.492.206.000,00							2.900.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						11.492.206.000,00							2.900.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi	12,35 % 3,17 % 2,75 % 2,62 % 0,75 % 3,46 % 2,25 %			3,3 % 12,19 % 2,19 % 0,67 % 2,3 % 1,94 % 2,72 %	2.000.000.000,00						12,32 % 2,95 % 2,35 % 2,46 % 0,73 % 3,38 % 2,24 %	2.000.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-				2.000.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	2.000.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				10000 Batang	2.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		2.000.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui Persentase Lahan Sawah yang dialiri jaringan Irigasi Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian	0,16 % 12,5 % 0,2 %			10 % 0,12 % 0,13 %	9.492.206.000,00						0,14 % 11,25 % 0,16 %	900.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-				9.492.206.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	900.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	9.492.206.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR
		UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						3.350.000.000,00							2.260.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						700.000.000,00							700.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						700.000.000,00							700.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	700.000.000,00						-	700.000.000,00	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	700.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	700.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	700.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		700.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.650.000.000,00							1.560.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2.650.000.000,00							1.560.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi	12,35 % 3,17 % 2,75 % 2,62 % 0,75 % 3,46 % 2,25 %			3,3 % 12,19 % 2,19 % 0,67 % 2,3 % 1,94 % 2,72 %	650.000.000,00						12,32 % 2,95 % 2,35 % 2,46 % 0,73 % 3,38 % 2,24 %	660.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-				650.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	660.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			Jumlah Sertifikat Benih				1 Sertifikat	650.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		660.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui Persentase Lahan Sawah yang dialiri jaringan Irigasi Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian	0,16 % 12,5 % 0,2 %			10 % 0,12 % 0,13 %	2.000.000.000,00						0,14 % 11,25 % 0,16 %	900.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Pemeliharaan, Pembangunan Laboratorium, Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Gudang Kantor dan penyediaan sarana dan prasarana UPTD	-			1 Paket	2.000.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	900.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	2.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD SERTIFIKASI BENIH- TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA						1.700.000.000,00							1.650.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						600.000.000,00							550.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						600.000.000,00							550.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	600.000.000,00						-	550.000.000,00	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	550.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	600.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		550.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.100.000.000,00							1.100.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.100.000.000,00							1.100.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bush-Buahan Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi	12,35 % 3,17 % 2,75 % 2,62 % 0,75 % 3,46 % 2,25 %			3,3 % 12,19 % 2,19 % 0,67 % 2,3 % 1,94 % 2,72 %	1.100.000.000,00						12,32 % 2,95 % 2,35 % 2,46 % 0,73 % 3,38 % 2,24 %	650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	-			2 Paket	1.100.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	650.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				10 Ton	500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		300.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				18 Ton	600.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		350.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui Persentase Lahan Sawah yang dialiri jaringan Irigasi Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian	0,16 % 12,5 % 0,2 %			10 % 0,12 % 0,13 %	0,00						0,14 % 11,25 % 0,16 %	450.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Gudang Kantor dan Penyediaan Sarana/prasarana UPTD	-			undefined undefined	0,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK ANEKA TANAMAN GABE HUTARAJA
		UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA						9.610.000.000,00							2.080.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						650.000.000,00							650.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						650.000.000,00							650.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	650.000.000,00						-	650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	650.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	650.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	650.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		650.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						8.960.000.000,00							1.430.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						8.960.000.000,00							1.430.000.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi	12,35 % 3,17 % 2,75 % 2,62 % 0,75 % 3,46 % 2,25 %			3,3 % 12,19 % 2,19 % 0,67 % 2,3 % 1,94 % 2,72 %	960.000.000,00						12,32 % 2,95 % 2,35 % 2,46 % 0,73 % 3,38 % 2,24 %	980.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Tanaman Pangan	-			1 Paket	960.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	980.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				120,45 Ton	960.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		980.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui Persentase Lahan Sawah yang dialiri jaringan Irigasi Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian	0,16 % 12,5 % 0,2 %			10 % 0,12 % 0,13 %	8.000.000.000,00						0,14 % 11,25 % 0,16 %	450.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Gudang Kantor dan Penyediaan Sarana/prasarana UPTD	-			undefined undefined	8.000.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	8.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PADI TANJUNG MORAWA
		UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT						1.150.000.000,00							1.600.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						650.000.000,00							650.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						650.000.000,00							650.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	650.000.000,00						-	650.000.000,00	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	650.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	650.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	650.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		650.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						500.000.000,00							950.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						500.000.000,00							950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi	12,35 % 3,17 % 2,75 % 2,62 % 0,75 % 3,46 % 2,25 %			3,3 % 12,19 % 2,19 % 0,67 % 2,3 % 1,94 % 2,72 %	500.000.000,00						12,32 % 2,95 % 2,35 % 2,46 % 0,73 % 3,38 % 2,24 %	500.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Tanaman Pangan	-			1 Paket	500.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	500.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				10 Ton	500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		500.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui Persentase Lahan Sawah yang dialiri jaringan Irigasi Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian	0,16 % 12,5 % 0,2 %			10 % 0,12 % 0,13 %	0,00						0,14 % 11,25 % 0,16 %	450.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Gudang Kantor dan Penyediaan Sarana/prasarana UPTD	-			undefined undefined	0,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT
		UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN						3.600.000.000,00							4.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.400.000.000,00							2.250.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						2.400.000.000,00							2.250.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.900.000.000,00						-	1.900.000.000,00	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.900.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	1.900.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.900.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		1.900.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
2.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase kenaikan unit usaha yang memiliki sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan	10 %			10 %	500.000.000,00						10 %	350.000.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-				500.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	350.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		350.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.200.000.000,00							2.050.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.200.000.000,00							2.050.000.000,00	
1.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui Persentase Lahan Sawah yang diairi jaringan Irigasi Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian	0,16 % 12,5 % 0,2 %			10 % 0,12 % 0,13 %	0,00						0,14 % 11,25 % 0,16 %	900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Pemeliharaan, Pembangunan Laboratorium, Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Gudang Kantor dan penyediaan sarana dan prasarana UPTD	-			undefined undefined	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	900.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian														
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		450.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
2.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Pengendalian Serangan OPT	411594 Ha			508141 Ha	1.200.000.000,00						457327 Ha	1.150.000.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-				1.200.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	1.150.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1500 Ha	950.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		850.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				160 Ha	250.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		300.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PENGAWASAN MUTU KEAMANAN PANGAN
		UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN						2.250.000.000,00							2.100.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	1.000.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.000.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	1.000.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		1.000.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.250.000.000,00							1.100.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.250.000.000,00							1.100.000.000,00	
1.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui Persentase Lahan Sawah yang dialiri jaringan Irigasi Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian</i>	0,16 % 12,5 % 0,2 %			10 % 0,12 % 0,13 %	300.000.000,00						0,14 % 11,25 % 0,16 %	300.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Uji Mutu Alsintan dan Modifikasi Alsintan</i>	-			4 Unit	300.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	300.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>				1 Laporan	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-		300.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN
2.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	<i>Persentase Kelompok tani dengan peningkatan kelasnya Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani</i>	90 % 0,75 %			0,65 % 90 %	950.000.000,00						90 % 0,7 %	800.000.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-				450.000.000,00			-	Peningkata n Pertumbu han Ekonomi Inklusif	-	-	475.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				150 Orang	450.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		475.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	undefined	-			undefined undefined	500.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	-	325.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN	
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani															
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				120 Kelompok	500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		325.000.000,00	UPTD PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN	
		J U M L A H						209.219.146.608,00								213.685.000.000,00	

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan nasional, pada Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara mengusulkan program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung prioritas nasional. Berikut adalah dukungan Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Prioritas Nasional.

Tabel 4.1 Dukungan Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Prioritas Nasional.

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024		
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)
								Keluaran Sub Kegiatan	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				
						Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	700.000.000,00
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	500.000.000,00
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi				600.000.000,00
2	09	03	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi				
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	600.000.000,00
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi				
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	700.000.000,00
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi				
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	800.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				

3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
3	27	02	1.02	05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan			
					Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	29.378.303.700
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani			
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000.000
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani			
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.661.940.608
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000.000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
					Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450 Ha	200.000.000
3	27	05	1.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	330.000.000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			

3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			
					Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	3.300.000.000,00
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			
					Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	632 Kelompok	7.400.000.000,00
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			
3	27	07	1.03	05	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani			
					Persentase Kelompok tani dengan peningkatan kelasnya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	500.000.000,00
3	27	07	1.03	06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani			
					Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 unit	1.350.000.000

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pada Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara mengusulkan program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung prioritas Provinsi dan Kegiatan Strategis Provinsi. Berikut adalah dukungan Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung prioritas Provinsi dan Kegiatan Strategis Provinsi.

Tabel 4.2 Dukungan Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung prioritas Provinsi dan Kegiatan Strategis Provinsi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
						Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	700.000.000,00
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	500.000.000,00

2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		600.000.000,00
2	09	03	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi		
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 600.000.000,00
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 700.000.000,00
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen 800.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
3	27	02	1.02	05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		
					Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan 29.378.303.700
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen 4.000.000.000
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		

					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.661.940.608
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000.000

Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan pada Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara turut mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD. Berikut adalah dukungan Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung/mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD.

Tabel 4.3 Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung/mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024			
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	
								Keluaran Sub Kegiatan		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					
3	27	02	1.02	05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan					
						Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	29.378.303.700	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani					

					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000.000
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani			
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.661.940.608
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000.000

Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan pada Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara juga turut mempertimbangkan usulan masyarakat/kabupaten/kota yang dihimpun pada Musrenbang RKPD Lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura se Sumatera Utara yang diikuti oleh Dinas lingkup Tanaman Pangan dan Hortikultura se Sumatera Utara. Berikut adalah dukungan Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung/mengakomodir usulan masyarakat/kabupaten/kota hasil Musrenbang RKPD Lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura se Sumatera Utara.

Tabel 4.4 Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung/mengakomodir usulan masyarakat/kabupaten/kota hasil Musrenbang RKPD Lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura se Sumatera Utara

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
						Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	700.000.000,00
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	500.000.000,00
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			600.000.000,00
2	09	03	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi			

					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	600.000.000,00
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi			
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	700.000.000,00
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	800.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
3	27	02	1.02	05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan			
					Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	29.378.303.700
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani			
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000.000
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani			

					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.661.940.608
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000.000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
					Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450 Ha	200.000.000
3	27	05	1.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	330.000.000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			
					Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	3.300.000.000,00
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			
					Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	632 Kelompok	7.400.000.000,00
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			
3	27	07	1.03	05	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani			
					Persentase Kelompok tani dengan peningkatan kelasnya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	500.000.000,00
3	27	07	1.03	06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani			
					Jumlah Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 unit	1.350.000.000

BAB - V

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung Prioritas Nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Prioritas Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dan usulan masyarakat/kabupaten/kota dari hasil Musrenbang RKPD Lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura se Sumatera Utara yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yaitu ***Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura*** dan ***Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat***

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yang memuat rencana dalam kurun waktu satu tahun ini telah disusun sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara telah memperhatikan permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi, juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan terhadap pembangunan pertanian di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi, misi yang ditetapkan, ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan yang dihimpun berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) Provinsi Sumatera Utara TA. 2024. Program dan kegiatan yang dihasilkan melalui Musrenbangtan tersebut dipadukan dan disinkronkan dengan rencana program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Renja ini.

Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diupayakan agar terlaksana dengan maksimal berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, adalah adanya dukungan dan komitmen dari seluruh stakeholder, DPRD dan pemerintah kabupaten/kota. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional umumnya dan daerah khususnya. Dan pada akhir tahun wajib dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan mengetahui penyebab masalah yang menghambat pencapaian. Tujuan dan sasaran, dimana hasil dari evaluasi tahunan tersebut

dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan semangat dan memohon ridho dan kekuatan dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita wujudkan pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara ini disusun sebagai Pedoman Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Program dan Kegiatan TA. 2024. Menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyusunan Renja ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak berupa usul dan saran-saran untuk perbaikan pada berikutnya.

MEDAN, Juli 2023

DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
K E P A L A,



RAJALI, S.Sos, M.SP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19670208.198611.1.001